LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) 2021

KANTOR KECAMATAN JETIS

KAB. MOJOKERTO

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Jetis Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Jetis Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Januari 2022

CAMAT JETIS

MADYA ANDRIYANTO, S.Sos., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 196608031988091002

DAFTAR ISI

		Hal
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
BAB I	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
	C. Struktur Organisasi	4
	D. Sistematika Penyajian	6
BAB II	Perencanaan Kinerja	8
	A. Rencana Kinerja Tahunan.....	8
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	10
BAB III	A. Capaian Kinerja.....	13
	B. Analisis Capaian Kinerja	14
	C. Realisasi Anggaran	25
BAB IV	Penutup	30
	A. Kesimpulan	30

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, yang selanjutnya telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanyaberdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Jetis Tahun 2021 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Hal ini semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Kantor Kecamatan Jetismempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, disisi yang lain, penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Jetisjuga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting

pelaksanaan good governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanannya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Jetis berada pada bagian selatan ibukota Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 35.697 km2 yang terdiri dari 2.276,181 km2 lahan pertanian dan non pertanian 33.420,819 km2 lahan perumahan dan pekarangan. Di Jetis sekarang banyak berdiri Kawasan industri baru seperti di desa Perning dan Mlirip. Perusahaan produsen bumbu masak terbesar di Indonesia salah satu pabriknya terdapat di desa Mlirip. Wilayah Kecamatan Jetis terletak pada ketinggian antara 48 m diatas permukaan air laut. Adapun batas – batas wilayah kecamatan Jetis sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kec. Dawarblandong
- Sebelah Timur : Kec. Wringin Anom Kab. Gresik
- Sebelah Selatan : Kota Mojokerto
- Sebelah Barat : Kec. Gedeg dan Kec. Kemlagi

PETA WILAYAH KECAMATAN JETIS

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kantor Kecamatan Jetis mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto ini terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

7. Seksi Pembangunan
8. Seksi Kemasyarakatan
9. Seksi Pelayanan
10. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Jetis berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Seta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas:

a. Camat;

b. Sekretariat Kecamatan;

a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian;

b) Sub Bagian Penyusunan program dan keuangan;

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Pembangunan;

e. Seksi Kemasyarakatan;

f. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;

g. Seksi Pelayanan.

Berkaitan denganpermasalahan utama (strategic issue) sertaIsu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Jetisdiantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

a. Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan dipengaruhi 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh managemen Kecamatan Jetis.

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana meskipun dalam jumlah yang sedikit untuk biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Jetis.
2. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Volume pekerjaan yang ada tidak ditunjang oleh ketersedian jumlah aparatur kecamatan yang kurang mencukupi. Berdasarkan analisa beban kerja tahun 2021, Kecamatan Jetis masih membutuhkan kurang lebih sebanyak 5 orang pegawai.
2. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik ditingkat kecamatan maupun desa sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan.

b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh managemen Kecamatan Jetis dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

- Faktor Peluang Organisasi

1. Kondisi Wilayah Kecamatan Jetis termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan kegiatan lainnya.
2. Adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan

lingkungan dan jembatan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya Wilayah Kecamatan Jetis ;

3. Keadaan masyarakat yang relatif kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.

- Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kondisi kebersihan lingkungan.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
3. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.
4. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan khususnya SDM yang ada pada Perangkat Desa.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Jetis selama tahun 2021. Capaian kinerja (performance results) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Jetis Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BabIII Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
B. Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan, dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BabIV Penutup, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana strategis Kantor Kecamatan Jetis Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Kantor Kecamatan Jetis pada tahun 2021 sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021 SEBELUM REVIU KECAMATAN JETIS			
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja OutPut	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian,	81%

		Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	

RKT HASIL PERBAIKAN/REVIU TAHUN 2021

KECAMATAN JETIS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	81%

G. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dijelaskan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Secara umum format perjanjian kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

KECAMATAN JETIS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun ,	81%

		bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.981.582.654	APBD-P
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 25.000.000	APBD-P
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 110.000.000	APBD-P
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 58.260.000	APBD-P
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 76.760.000	APBD-P
TOTAL ANGGARAN TAHUN 2021		**Rp. 3.251.604.654**	

PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERBAIKAN TAHUN 2021

KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja OutPut	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	81%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.905.942.954	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 25.000.000	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 110.000.000	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 70.000.000	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 80.000.000	APBD
	JUMLAH	**Rp. 3.190.942.954**	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Jetis Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Jetis Tahun 2021 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Jetis Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1

Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%	98,71%	100%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	81%	94,65%	100%

.

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 Indikator 1

Sasaran pertama indikator pertama yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan pada Kecamatan Jetis dengan target baik, realisasi baik dengan capaian 99 %. Adapun program yang dilaksanakan adalah:

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sasaran Strategis 1 Indikator 2

Sasaran pertama indikator kedua yaitu Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Jetis dengan target baik, realisasi baik dengan capaian 90 %. Adapun program yang dilaksanakan adalah:

- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja OPD Kecamatan Jetis pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
			Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Nilai Indeks pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	78 Baik	84,5 Baik	-	-
	Cakupan pelayanan umum dan perijinan	78%	100%	-	-

Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	2%	(6,36%)	-	-
Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan	Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP	79%	-	85,53 %	
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	79%	-	98,42 %	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%	-	-	98,71%
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	81%	-	-	94,65%

c) Membandingkan realisasi kinerja s/d akhir tahun renstra

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Nilai Indeks pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80 Sangat Baik	78 Baik	97,5%
	Cakupan pelayanan umum dan perijinan	80%	78%	97,5%
Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	4% Dari tahun ke nol renstra (tahun 2016)	(6,36%)	0%
Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan	Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP	81%	85,53%	100%
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum,	81%	98,42%	100%

	Kesejahteraan Sosial			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%	98,71%	100%
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	81%	94,65%	100%

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi Nasional

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	98,71%	-	-
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	89,61%	-	-

e) Analisis atas keberhasilan dan kegagalan serta peningkatan dan penurunan kinerja

Tabel 3.5

COST PER OUTCOME

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar	25.000.000	0,77%

		Pelayanan		
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	245.020.000	7,54%

Tabel 3.6

COST PER OUTCOME

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%	98,71%	100%	25.000.000	24.676.400	98,71%
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1300 Pelayanan	1300 Pelayanan	100%	25.000.000	24.676.400	98,71%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	44 Kegiatan	44 Kegiatan	100%	245.020.000	231.910.950	94,64%
1. Program Pemberdayaan		24 Kegiatan	24 Kegiatan	100%	110.000.000	107.265.050	97,51%

Masyarakat							
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	58.260.000	55.863.200	95,89%
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		16 Fasilitasi	16 Fasilitasi	100%	76.760.000	68.782.700	89,61%

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%	98,71%	1,29%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	100%	94,64%	5,36%

PENYAJIAN DATA KINERJA

Tabel 3.8

Persentase Penduduk Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 – 2020

Tahun	Jeni Kelamin		Total	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
2019	43.466	42.016	85.482	103,45
2020	44.398	43.369	87.767	102,37

Sumber : data lap kependudukan Kec. Jetis

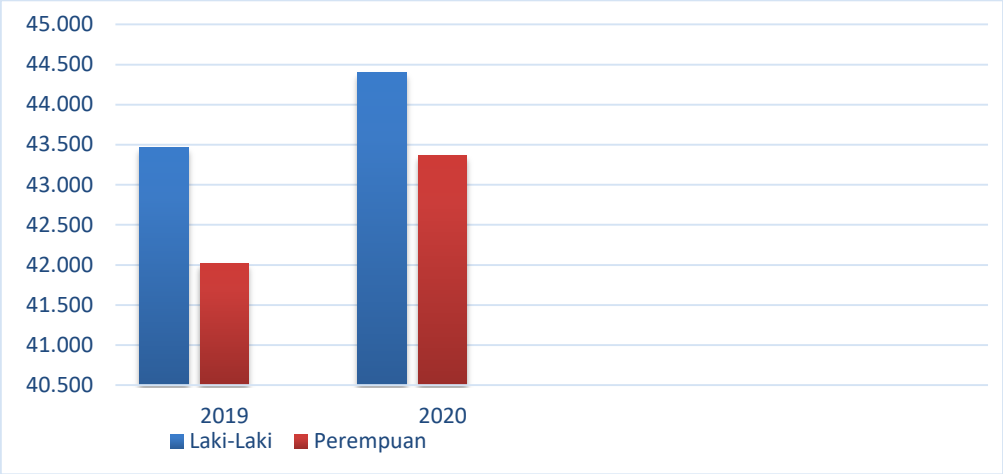

5. **Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja**

Tabel 3.9

Perbandingan jumlah anggaran dan penyerapan anggaran Tahun 2021

NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.981.582.654	Rp. 2.280.841.982	76,4%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 25.000.000	Rp. 24.676.400	98,7%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 110.000.000	Rp. 107.265.050	97,5%

4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 58.260.000	Rp. 55.863.200	95,8%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 76.760.000	Rp. 68.782.700	89,6%

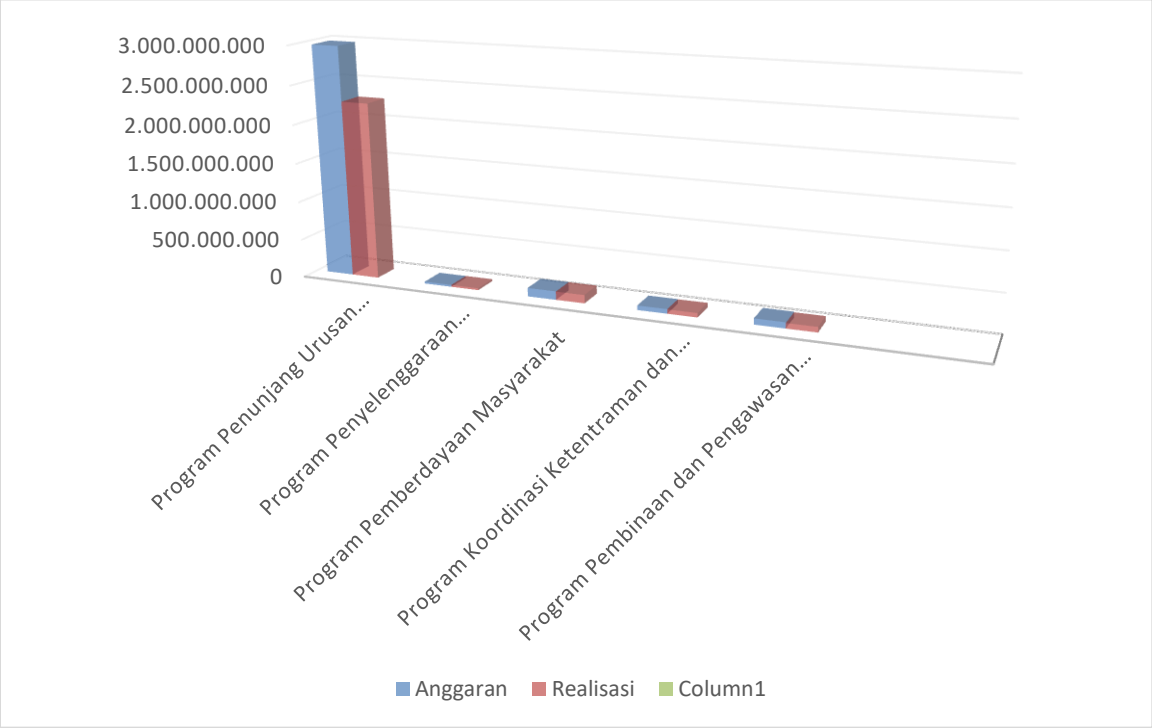

Tabel 3.10

Persentase Realisasi PBB Kecamatan Jetis Tahun 2017 s/d Tahun 2019

NO	TAHUN	BAKU	REALISASI	%
1	2019	3.624.680.908	2.794.244.395	76,54
2	2020	3.586.750.118	2.234.264.726	62,29
3	2021	3.681.105.060	2.587.970.222	70,29

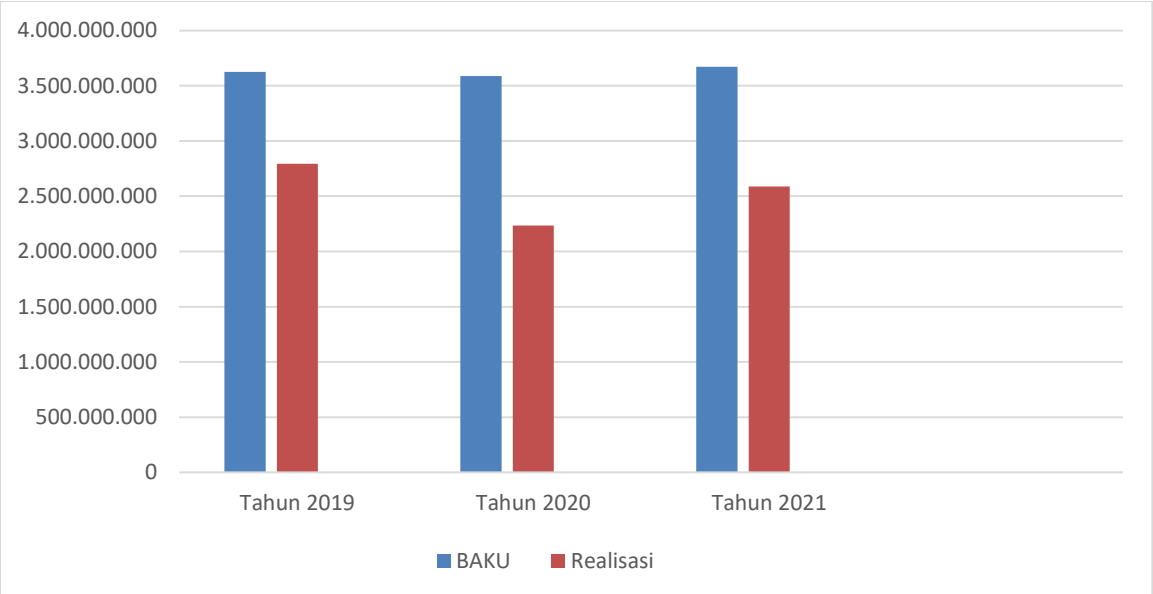

C. Realisasi Anggaran

Dari pagu anggaran Belanja Langsung Kecamatan Jetis Tahun 2021 sebesar Rp. 3.251.602.654,00 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.537.429.332 atau 78% dengan rincian per program kegiatan sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan	TA. 2021		% Capaian
					Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	826.700	82,67
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	826.700	82,67
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.402.402.954	1.741.446.069	72,49

				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000	9.658.800	96,59
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	6.702.000	95,74
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	230.000.000	223.393.750	97,12
				Penyediaan bahan Logistik Kantor	37.500.000	37.500.000	100
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000	5.935.000	84,78
				Penyediaan Bahan/Material	12.000.000	11.344.000	94,53
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.268.905	13.480.000	94,47
		4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	37.000.000	35.832.000	96,84

				lapangan			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.196.000	19.712.000	92,99
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasrana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	13.067.000	87,11
		5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11.410.795	11.264.000	98,71
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.000.000	27.468.387	59,71
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.804.000	53.391.576	99,23
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.000.000	4.771.500	95,43

				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	20.000.000	19.904.900	99,52
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	45.000.000	44.480.000	98,84
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65.000.000	62.785.050	96,59
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	38.260.000	37.962.000	99,22
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	20.000.000	17.901.200	89,50
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16.000.000	15.248.400	95,30

				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24.000.000	20.957.500	87,32
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.000.000	5.200.000	65
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13.500.000	12.191.200	90,30
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	15.260.000	15.185.600	99,51
6	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.000.000	68.994.000	91,99

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategik, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata menunjukkan bahwa semua indikator sudah hampir mencapai target.

Langkah–langkah yang dilaksanakan untuk memenuhi target :

- Melakukan perencanaan yang seksama merupakan salah satu langkah guna menekan jarak antara target dan realisasi.
- Pada tahun mendatang optimalisasi anggaran adalah hal yang harus dilakukan sebagai langkah untuk memenuhi target dengan dana yang tersedia.

Dari total belanja langsung SKPD Kecamatan Jetis Tahun 2021 sebesar Rp. 3.251.602.654,00 dapat terserap sebesar Rp. 2.537.429.332 atau 78%.

B. SARAN

Untuk meningkatkan Kinerja Kecamatan Jetis pada tahun mendatang, maka disarankan untuk setap pengelola program melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Mengupayakan keseuaian atau kecukupan anggaran dengan kebutuhan untuk kegiatan serta pegawai di Kecamatan Jetis.
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya BPKAD, BAPPEDA, Bagian Tata Usaha dan Bagian Hukum Setda Kab. Mojokerto serta instansi terkait lainnya.

CAMAT JETIS

MADYA ANDRIYANTO, S.Sos., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 196608031988091002